



4 Kabupaten Belum WTP

PONTIANAK-RK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum diraih seluruh kabupaten/kota se-Kalbar. Masih ada empat kabupaten yang penilaian laporan keuangannya Wajar dengan Pengecualian (WDP). Yakni Kabupaten Melawi, Kayong Utara, Sambas dan Kabupaten Bengkayang. **Baca Hal... 4**

ZONA INTEGRITAS.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menandatangani Piagam Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (29/3).

PEMROV KALBAR
FOR RAKYAT KALBAR



"Kita harap tahun ini empat kabupaten ini bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI," harap Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan di acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran (TA) 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (29/3).

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se-Kalbar siap diperiksa atau diaudit oleh BPK RI. "Kami siap diaudit kembali. Semoga semua yang telah meraih opini WTP tetap dapat mempertahankan opini

4 Kabupaten Belum WTP

WTP. Untuk kabupaten yang belum meraih opini WTP diharapkan tahun ini bisa meraih opini WTP," kata Norsan.

Wagub Kalbar meminta Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Kalbar tetap meningkatkan kualitas kinerja, agar semakin efektif dan efisien sesuai visi dan misi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang bagi masyarakat Kalbar agar lebih baik lagi. "Kita berikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang menetapkan zona integritas bebas wilayah korupsi. Supaya kita ada rambu-rambu yang mengingatkan kita, tidak terjerumus masalah

korupsi," ingatnya.

Dikatakannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalbar telah melakukan pemeriksaan interim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci, setelah penyerahan laporan keuangan oleh Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Kalbar.

Berdasarkan ketentuan pasal 297 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan, setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, Kepala BPK RI

Perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono menuturkan, bagi pemerintah daerah baik di kabupaten maupun kota yang ada di Kalbar agar menyerahkan LKPD tepat waktu. "Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memicu dan pacuh daerah-daerah yang belum menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Karena ini disaksikan oleh daerah lain, sehingga menimbulkan semangat untuk menyerahkan laporan keuangannya dengan waktu yang telah ditentukan," pungkasnya.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Yuni Kurniyanto